

MEWUJUDKAN POLRI SEBAGAI LEMBAGA PELAKSANA TUGAS KEPOLISIAN YANG PROFESIONALISME DAN MANDIRI

Kol. Pol. DR. Teguh Soedarsono, S.IK., S.H., M.Si
Wakadislitbang POLRI

Salah satu tuntutan masyarakat dalam era reformasi saat ini adalah diwujudkan-nya suatu Lembaga Kepolisian yang Mandiri (tidak terstruktur menjadi satu lembaga militer) dan mempunyai postur serta kemampuan profesionalisme sesuai tingkat perkembangan jamannya, hal tersebut secara bertahap dan berlanjut sedang dalam upaya dan proses perwujudannya.

Sehubungan tuntutan kebutuhan tersebut disampaikan suatu kajian tentang pembangunan Polri sebagai Lembaga Kepolisian yang mandiri dalam ruang lingkup pengembangan tugas, pembinaan personil dan pembangunan manajemen sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi saat ini.

Pengembangan tugas Polri sesuai tingkat kehidupan masyarakat memerlukan berbagai sentuhan terhadap nilai, moral, falsafah, etika maupun tata kerja yang mendasari pembentukan sifat dan struktur organisasi kelembagaan,

norma maupun kebutuhan kemampuan dan piranti kerja yang menjadi disiplin tugasnya. Untuk hal tersebut perlu dikenali terlebih dahulu berbagai aspek yang melatar belakangi, melingkupi dan atau mewarnai tuntutan tugas kepolisian yang terkandung dalam kebijaksanaan Polri mandiri tersebut, yaitu antara lain adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kepolisian, karena dengan mengetahui hal tersebut dapat ditentukan peran, kewenangan, tugas maupun kelembagaan Polri yang harus diwujudkan. Berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat akan layanan kepolisian tersebut harus menjadi acuan atau konsensus dalam pola pikir dan sikap tindak kerja Polri, sehingga berbagai komitmen kerja, wujud kelembagaan dan penampilan serta postur dan potensi kerja Kepolisian yang harus dibentuk dalam lembaga Polri harus dapat diselaraskan

dengan harapan masyarakat terhadap tuntutan kebutuhan akan kepolisian tersebut.

2. Politik Pemerintah dan kemauan masyarakat untuk menjadikan Sistem tugas Kepolisian sebagai komponen penting dalam mewujudkan kelangsungan Pembangunan Nasional, hal ini dapat ditampakan dari kehidupan Politik, ekonomi maupun sosial yang menyangkut pelaksanaan dan keberhasilan kerja Polri. Hal tersebut juga dapat tercermin dari keberadaan dan atau kepentingan berbagai pihak terkait dalam pekerjaan kepolisian, serta sejauh mana kemampuan dan dominasi Polri itu sendiri dalam melaksanakan peran berbagai peran dan tugas Kepolisian yang diembannya.

3. Konsep Pembangunan Sistem tugas kepolisian yang mengarah pada berbagai hal yang menyangkut situasi dan kondisi lingkungan strategis dalam Pembangunan Nasional, dalam hal ini ditampakkan dari harapan berbagai pihak dalam mewujudkan suasana tertib hukum dan ketentraman dari harapan berbagai masyarakat melalui pelaksanaan tugas kepolisian yang dibebankan pada pundak Polri.

Berbagai hal tersebut di atas harus dicerna dan diwujudkan dalam kultur pembentukan Polri sebagai lembaga Kepolisian mandiri, antara lain dalam hal sebagai berikut :

1. Kebijakan dalam pembinaan sistem tugas kepolisian, pembentukan kesiapan kemampuan fisik, sarana maupun sumber daya Polri harus disesuaikan dengan berbagai permasalahan, gejolak dan konflik sosial yang sedang berkembang dalam kehidupan masyarakatnya, khususnya yang bersangkutan dengan tingkat mobilitas dan perkembangan penduduk, kemajuan teknologi, pergeseran tata nilai serta tuntutan kebutuhan hidup yang layak;

2. Kebijakan melakukan validasi struktur maupun prosedur organisasi tugas Polri yang dilakukan secara selektif dan prioritas dalam proses insidental maupun periodik harus didasarkan pada konsensus kerja Polri dengan memperhatikan aspek keterbatasan kemampuan dan kelangkaan sumber daya di lingkungannya; dan

3. Penentuan berbagai arah, sasaran dan target operasional dalam bidang pembinaan kemampuan maupun pelaksanaan tugas Polri harus selalu dapat disesuaikan dengan dinamika, tuntutan dan pola hidup masyarakat yang menyangkut aspek politik, ekonomi sosial maupun teknologi.

Untuk melakukan pembinaan sumber daya personil Polri dalam pelaksanaan tugas kepolisian yang profesional, terlebih

dahulu harus diketahui berbagai prinsip pokok dalam pola interaksi yang berlaku pada human ecology, yaitu antara lain adalah sebagai berikut :

1. **Prinsip dalam interaksi sosial** yang membutuhkan sikap saling keterkaitan dan ketergantungan antar komponen, khususnya dalam proses pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya di lingkungannya secara bersama. Mendasarkan prinsip tersebut, pembinaan sumber daya personil Polri harus mendasarkan pada berbagai pola kehidupan antroposentris dari berbagai unsur komponennya, baik dalam hubungan *imanan* yang bersifat inklusif maupun dalam hubungan *transenden* yang bersifat eksklusif.

2. **Prinsip dalam adaptasi sosial** yang dikaitkan dengan kondisi keberadaan, kelimpahan dan proses pendistribusian sumber daya personil tugas Kepolisian dalam lingkup lokal , temporal maupun berlanjut. Dalam hal ini setiap proses adaptasi sosial yang harus dilakukan dalam tugas Polri selain akan memberikan produktifitas juga akan menjadikan suatu degradasi bagi lingkungannya sehingga memperhatikan hal ini agar dalam penentuan kebijaksanaan yang mengakibatkan suatu perubahan dalam lingkup populasi,

komunitas dan atau relung kehidupan (*niche*) sumber daya personil Polri harus dapat diprediksikan berbagai bentuk akibat atau dampak yang ditimbulkan dalam evolusi kondisi dan kemampuannya.

3. **Prinsip terjadinya kerusakan dan kesusutan sumber daya** yang sering terjadi karena disebabkan adanya faktor keterpaksaan, keterbatasan pengetahuan dan atau kecerobohan dalam proses pendayagunaan dan atau pengelolannya sehingga memperhatikan hal tersebut dalam setiap kebijaksanaan perawatan, reproduksi maupun pembinaan sumber daya personil Polri harus dapat memperhatikan berbagai aspek masalah yang melingkupinya.

4. **Prinsip kelangsungan hidup** yang tampak dalam proses eksistensi degradasi dan destruksinya dala rangka survival, dominansi dan atau *growth development* sehubungan dengan situasi dan kondisi lingkungan yang dihadapinya, sehingga mendasari prinsip tersebut maka dalam pembinaan sumber daya personil Polri yang terlebih dahulu diketahui peta interaksi sosial tugas kepolisian yang harus diemban Polri, agar dalam pembinaan dan pengembangannya dapat ditentukan dasar arah dan target operasionalnya sesuai situasi yang dihadapinya.

5. Prinsip kompetisi hidup yang ditampilkan dalam berbagai bentuk motivasi, sikap perilaku, aspirasi, persepsi dan peran serta dari berbagai unsur kehidupan dalam ekosistem kerjanya, sehingga memperhatikan prinsip tersebut maka dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya personil POLRI perlu memperhatikan setiap sikap apatisme dan atau antipati dari pihak lain yang dapat menjadi sumber konflik dalam kelangsungan kerjanya.

6. Prinsip kelangkaan momentum dan keterbatasan sumber daya sehubungan dengan adanya keterbatasan kemampuan, waktu dan atau ruang gerak dengan melingkup kehidupan para personil POLRI, mendasari prinsip tersebut maka dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya personil POLRI perlu selalu mewaspadaai berbagai pola perilaku menyimpang yang dilakukan oleh oknum unsur personil POLRI dalam pemenuhan tuntutan kebutuhan hidupnya agar tidak merusak kondisi kelangsungan dan keterbatasan tugas POLRI di lingkungannya. Memperhatikan berbagai prinsip ekologi tersebut di atas, maka pembinaan dan pengembangan sumber daya personil POLRI sebagai pelaksana tugas lembaga kepolisian yang mandiri harus dapat mendasarkan pada berbagai tuntutan kebutuhan tersebut di atas, baik dalam proses produksi, suksesi maupun dekomposisinya.

Untuk mewujudkan postur kemampuan profesional kepolisian kepada personil POLRI, terlebih dahulu perlu dipahami berbagai hal sebagai berikut :

1. Pengadaan sumber daya personil POLRI tidak dapat dilepaskan dari tuntutan kebutuhan jumlah, mutu, komposisi, dinamika serta struktur angkatan kerjanya yang dikaitkan dengan proses produksi, degradasi maupun dekomposisinya, oleh karena itu dalam proses pengadaan personil dan peningkatan profesional kepolisian yang dilakukan dalam pembinaan maupun pengembangan sumber daya personil POLRI selain harus memperhatikan kurva permintaan kemampuan personil POLRI dalam sektor dan kurun waktu penugasannya, juga harus memperhatikan aspek keseimbangan populasi dan komunitasnya yang dihadapkan pada aspek kesimbangan populasi dan komunitasnya yang dihadapkan pada aspek keterbatasan ruang, momentum maupun kemampuan pengadaan sarana dan prasarana tugasnya.

2. Pembinaan Sumber daya personil POLRI selain harus memperhatikan keterbatasan dalam pengadaan dan produktifitasnya, juga harus memperhatikan kesiapan kaderisasi kepemimpinan dalam proses evolusi dan suksesi alami yang dihadapinya.

3. Pendayagunaan sumber daya personil POLRI selain harus memperhatikan kemampuan kualitatif dan kuantitatif yang dibutuhkan, juga perlu memperhatikan

kelimpahan personil yang tidak mampu eksis dalam peran dan tugasnya, hal tersebut dilakukan untuk tidak menambah konflik sosial secara intern.

4. Pembinaan dan pengembangan sumber daya personil POLRI selain ditujukan untuk memenuhi tuntutan operasional dan atau pencapaian target optimal pelaksanaan tugas kepolisian sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, juga harus memperhatikan berbagai aspek pemenuhan tuntutan *leisure* untuk individu, keluarga maupun komunitas personil POLRI yang dikaitkan dengan tuntutan kebutuhan dalam proses produktifitas, eksistensi maupun degradasinya.

5. Evaluasi dan validasi terhadap mutu kemampuan dan atau postur sumber daya personil POLRI dalam peran dan tugasnya, harus juga memperhitungkan bentuk balas jasa atau imbalan serta pengadaan untuk kesejahteraan hidupnya yang sesuai dengan tingkat kebutuhan fisik minimum, indeks harga maupun pertumbuhan kehidupan masyarakat di daerah kerjanya.

Sedangkan untuk mengembangkan manajemen struktur dan postur organisasi kerja kepolisian dalam lembaga POLRI, terlebih dahulu harus memperhatikan berbagai hal sebagai berikut :

1. Pembinaan manajemen POLRI harus didasarkan pada suatu tatanan kerja yang

dilengkapi dengan sarana, sistem kerja serta piranti pengawasan yang tidak mematikan suasana demokrasi dalam kreatifitas maupun kompetisi kerja dari unsur fungsi dan unit kerjanya.

2. Penentuan unsur fungsi dan atau unit organisasi kerja kepolisian yang harus diprioritaskan sebagai ujung tombak atau lapis kemampuan terdepan dalam operasional tugas POLRI, harus ditunjang dengan kemampuan memotivasi agar seluruh komponen kerjanya mampu mengetahui, loyal dan dapat mewujudkan setiap rencana, sasaran maupun target kerja organisasi yang ditentukan. Dalam hal ini inti kemampuan motivasi tersebut meliputi kesiapan berbagai potensi untuk melakukan *human relation* yang menyentuh aspek pembinaan kepemimpinan (*leadership and executive development*), tugas serta kedisiplinan kerja.

3. Dalam proses pengembangan dan pembinaan manajemen organisasi kerja kepolisian sebagai unit pelayanan publik, perlu memperhatikan berbagai hal sebagai berikut :

a. Tingkat perkembangan teknologi dan kehidupan sosial masyarakatnya yang sering membuat berbagai keterbatasan kemampuan dalam heterogenitas kerjanya, sehingga untuk mengantisipasi hal ini perlu diciptakannya kondisi kerjasama antar

unit kerja maupun dengan unit kerja pada organisasi kerja lain yang terkait secara harmonis;

b. Struktur dan mobilitas penduduk yang ditimbulkan akibat proses migrasi penduduk dan pengembangan tata ruang, karena dengan mengetahui keadaan tersebut dapat ditentukan postur kemampuan mobilitas dan kecakapan komunikasi sosial setiap misi unsur fungsi dan unit kerja POLRI dalam pelaksanaan tugas kepolisian;

c. Berbagai kecenderungan perubahan dan atau perkembangan dalam tata kehidupan masyarakatnya yang berhubungan dengan berbagai masalah yang dapat menjadi sumber konflik, karena dengan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar penentuan misi tindakan, tahapan, sasaran maupun target pembinaan manajemen organisasi;

d. Filsafat hidup, nilai kerja serta sifat organisasi POLRI yang dapat membentuk ikatan moral dalam mewujudkan suatu tekad dan pola sikap hidup bersama, membangun kerjasama dan atau mewujudkan misi organisasi tugas kepolisian yang diembannya; dan

e. Kecakapan para pemimpin setiap unit kerjanya, karena inti keberhasilan

misi tugas dan kesuksesan organisasi kerja POLRI akan ditentukan oleh sikap perilaku dan keteladanan dari para pemimpin unit organisasi kerjanya, khususnya dalam menciptakan suasana kebersamaan dan kreatifitas kerja di lingkungan kepolisian.

Memperhatikan berbagai hal tersebut di atas, maka dalam pembinaan manajemen organisasi POLRI sebagai lembaga kepolisian yang profesional dan mandiri, diperlukan berbagai sentuhan sebagai berikut :

1. Menghadapi tuntutan tugas kepolisian yang semakin kompleks dengan di hadapkan pada berbagai keterbatasan, menuntut dibentuk dan dilakukan suatu sistem koordinasi kerja antar unit kerja dalam organisasi POLRI yang mampu menciptakan potensi yang optimal dalam tugas kepolisian.

2. Dalam proses pembinaan dan pengembangan manajemen POLRI agar dapat disesuaikan dengan gerak dan arah Pembangunan Nasional, sehingga pelaksanaan tugas POLRI dapat memenuhi berbagai tuntutan dan harapan masyarakat dalam layanan tugas kepolisian. Untuk hal ini dapat diwujudkan dengan proses pendidikan, latihan dan penelitian yang dilakukan dalam subsistem pembinaannya.

3. Untuk melakukan upaya penyiapan dan pembinaan kaderisasi pimpinan POLRI secara dini, konsisten dan berlanjut perlu diketahui tuntutan pemenuhan kebutuhan dalam proses suksesi alami yang dihadapi POLRI seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dalam layanan kepolisian di samping itu juga perlu diketahui kelangkaan momentum serta keterbatasan berbagai sumber daya yang dihadapi POLRI di masa yang akan datang.

4. Untuk meningkatkan kinerja, ethos kerja maupun disiplin kerja di lingkungan tugas POLRI, perlu dibudayakan sikap panutan atau keteladanan di kalangan elite eksekutif POLRI, sehingga untuk hal ini dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya personil POLRI perlu memperhatikan prestasi dan kompetensi karier yang baik;

5. Untuk meningkatkan profesional kerja kepolisian dalam lembaga POLRI dalam manajemen pembinaan dan penggunaan kemampuan tugas kepolisian dalam lembaga POLRI perlu ditumbuhkan budaya mau berpikir luas, sehingga setiap langkah kebijaksanaan dalam pelaksanaan tugas kepolisian yang diembannya tidak terfokus hanya pada jabaran kerja dalam antisipasinya terhadap aspek kriminalitas dalam siklus *criminal justice system* saja, namun dalam hal ini harus terarah dalam lingkup yang lebih luas sesuai dengan

tuntutan tugas kepolisian dalam pola kehidupan sosial masyarakat di jaman modern.

6. Proses evaluasi dan validasi pada manajemen tugas kepolisian dalam organisasi POLRI hendaknya dapat dilakukan secara berlanjut dengan mendasarkan data tentang tuntutan kebutuhan kemampuan dan tantangan tugas yang dihadapi, sehingga dalam setiap penugasan unsur fungsi dan atau unit tugas kepolisian dapat ditunjang dengan suatu penataan gelar kemampuan kepolisian, target sasaran serta kelengkapan sarana dan prasarannya sesuai tuntutan optimal kerja kepolisian yang efektif.

Memahami berbagai hal tersebut di atas maka untuk mewujudkan potensi lembaga kepolisian yang profesional dan mandiri dalam organisasi POLRI, perlu dilakukan berbagai kerja keras antara lain dalam hal sebagai berikut :

1. Mendasari keadaan faktual bahwa kelembagaan kepolisian dapat diartikan sebagai wujud penampilan organisasi, personil dan tugas kepolisian, maka dalam pembinaan dan pengembangan POLRI selanjutnya agar diarahkan pada tuntutan dan harapan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan layanan tugas kepolisian yang profesional. Untuk hal

tersebut agar selalu memperhatikan tata dan gerak ekologi dari ketiga bentuk penampilan lembaga kepolisian yang melingkup kehidupan POLRI.

2. Memahami bahwa tata nilai tujuan nasional suatu bangsa dan atau negara ditentukan oleh sistem sosial kehidupan masyarakatnya, maka dalam kebijaksanaan pengembangan dan pembinaan peran, tugas dan kemampuan POLRI sebagai unsur pelaksana penegakan hukum dan ketertiban umum agar dapat selalu diarahkan pada upaya pemenuhan tuntutan kebutuhan dalam mewujudkan kualitas ketertiban, keadilan dan ketentraman masyarakat yang obyektif.

3. Memperhatikan bahwa ekosistem

kehidupan merupakan sumber energi dan pola tatanan gerak dari berbagai unsur ekologi kehidupan, maka dalam penentuan setiap kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan kemampuan tugas kepolisian pada lembaga POLRI agar memasukan unsur upaya dalam membentuk tatanan kemampuan sistem fungsi dan kesenjataan kepolisian yang dilengkapi dengan kemampuan psikososial disetiap lini kerjanya. Dari paduan sistem kemampuan tersebut diharapkan berbagai kondisi permasalahan, tantangan dan kendala maupun situasi konflik yang selama ini meliputi pelaksanaan tugas kepolisian dalam kelembagaan POLRI dapat dideteksi secara dini, diantisipasi secara obyektif serta ditindaklanjuti secara segera dan optimal.

**HANYA KEPADA ALLAH SWT
KAMI MOHON PETUNJUK DAN
PERTOLONGAN**